

BAB II

KAJIAN TEORI, PENELITIAN RELEVAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem yang lahir akibat tuntutan masyarakat barat akan adanya persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan kehendak dan kekuasaan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh rakyat, atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam konsep demokrasi, posisi rakyat dapat bergeser ketika rezim yang berkuasa melakukan perubahan konstitusi yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak rakyat (Irawan, 2007: 54-55).

Demokrasi adalah sebuah tahapan atau suatu proses yang harus dilalui oleh negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Ada tidaknya sebuah demokrasi dalam suatu negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan dilihat dari fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh faktor budaya negara tersebut. Salah satu esensi demokrasi terletak pada ada tidaknya suatu kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk menentukan sebuah tatanan bagi landasan negara. Dengan demikian, kompromi menjadi sebuah syarat utama yang menentukan sebuah negara menganut prinsip demokrasi (Thalhah, 2009: 414-417).

Demokrasi didefinisikan sebagai "*the rule of the people*". Komponen yang terkandung dalam demokrasi yaitu "*rule*" dan "*people*", sehingga menghendaki adanya pemerintahan oleh rakyat. Untuk mencapai demokrasi memerlukan proses yang disebut demokratisasi. Proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang dan bukan perkara mudah. Demokratisasi dipahami sebagai proses transformasi dari sistem politik yang otoritarian menuju sistem politik

yang mengedepankan pemerintahan oleh rakyat sehingga tercipta proses pengambilan keputusan yang akuntabel dan representatif (Alami, 2016: 164).

Perwujudan sistem demokrasi pada tiap negara tergantung kondisi dan situasi negara yang bersangkutan. Menurut Huntington, ada tiga tanggapan umum yang melekat dalam konsep demokrasi. Pertama, demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan yang dapat diterima tapi juga merupakan doktrin politik yang akan menguntungkan banyak negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan memiliki akar sejarah zaman Yunani kuno dan sebagai bentuk ideal yang mampu bertahan selama beberapa abad dalam suasana politik penuh gejolak. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang natural, dalam arti jika rakyat di negara manapun bisa memenangkan kebebasannya untuk menentukan sendiri sistem politiknya, besar kemungkinan mereka akan memilih demokrasi (Hertanto, 2006: 140).

b. Karakteristik Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi diperlukan untuk membedakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis dengan sistem pemerintahan lainnya. Menurut Anggara (2013: 76), terdapat beberapa ciri sistem demokrasi, yaitu: adanya pergantian pemerintahan secara berkala, adanya kesempatan bagi setiap masyarakat untuk menempati kedudukan dalam pemerintahan pada masa jabatan tertentu, diakuinya tokoh-tokoh yang berkedudukan dalam pemerintahan maupun tokoh oposisi pemerintah yang sedang berkuasa, diakuinya kebebasan menyatakan pendapat bagi setiap anggota masyarakat.

c. Prinsip Demokrasi

Negara yang demokratis dapat dilihat melalui sistem pemerintahannya yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Robert Dahi dalam Anggara (2013: 78), prinsip yang harus ada dalam sistem pemerintahan negara demokrasi, yaitu: adanya kendali atas keputusan pemerintah yang berasal dari lembaga legislatif, adanya partisipasi aktif setiap warga negara melalui pemilihan yang teliti dan jujur, adanya hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara, adanya kebebasan menyatakan pendapat dengan rasa aman, adanya kebebasan mengakses informasi bagi setiap warga negara dan kewajiban

pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat serta adanya kebebasan berserikat yang terbuka untuk memberikan dorongan bagi warga negara.

d. Jenis-Jenis Demokrasi

Menurut Septiliana (2011: 176), berdasarkan cara penyampaian pendapat, jenis demokrasi terdiri dari:

- 1) Demokrasi langsung, yaitu sistem demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.
- 2) Demokrasi tidak langsung, yaitu sistem demokrasi yang dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu.
- 3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat (referendum).
- 4) Demokrasi formal, yaitu sistem demokrasi yang secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.
- 5) Demokrasi material, yaitu demokrasi yang memandang manusia memiliki kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan dalam bidang politik tidak menjadi prioritas. Sistem demokrasi ini dikembangkan di negara-negara sosial-komunis.
- 6) Demokrasi campuran, yaitu perpaduan antara demokrasi formal dan demokrasi material dalam rangka menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.
- 7) Demokrasi liberal, yaitu sistem demokrasi yang memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan dan pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum dasar).
- 8) Demokrasi rakyat (demokrasi proletar), yaitu sistem demokrasi yang menjamin semua warga negara mempunyai persamaan hak dalam hukum dan politik.
- 9) Demokrasi sistem parlementer;
- 10) Demokrasi sistem presidensial.

2. Politik Luar Negeri

a. Pengertian Politik Luar Negeri

Politik adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak demi tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Politik luar negeri berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar wilayah suatu negara. Politik luar negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak hanya melibatkan aspek-aspek eksternal melainkan juga mengenai aspek-aspek internal suatu negara. Politik luar negeri adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada. Politik luar negeri pada dasarnya merupakan seperangkat nilai, sikap, arah serta saran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional (Sitorus, 2018: 27-28).

Politik luar negeri didasari kepentingan nasional demi tercapainya tujuan nasional suatu negara. Politik luar negeri merupakan instrumen interaksi negara dalam percaturan politik internasional dengan dorongan kepentingan nasional tertentu. Konsep politik luar negeri dan kepentingan nasional tidak dapat dipisahkan karena keterkaitan kedua konsep tersebut. Kepentingan nasional merupakan elemen penting yang menjadi bagian dari sumber formulasi dan implementasi politik luar negeri. Politik luar negeri didefinisikan sebagai suatu mekanisme dalam sistem politik nasional guna menanggapi dinamika perubahan lingkungan baik dalam negeri maupun luar negeri dimana tujuan-tujuannya hendak diperjuangkan. Politik luar negeri diartikan pula sebagai suatu kebijakan nasional suatu negara yang berorientasi keluar guna berinteraksi dengan dunia serta menentukan keterlibatan suatu negara terhadap isu-isu internasional maupun lingkungan sekitarnya. Politik luar negeri memiliki tiga elemen dasar, yaitu; adanya sistem, adanya lingkungan yang dinamis, adanya tujuan yang ingin dicapai (Setiawan dkk, 2018: 12; Wicaksana, 2007: 13-14).

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra suatu negara dimana pemerintah melalui kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau

mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu dan dapat pula bersifat sementara sesuai dengan kondisi waktu tertentu. Tujuan politik luar negeri dapat dikategorikan berdasarkan nilai, jangka waktu (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang), tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain (Sitorus, 2018: 29-30).

b. Kebijakan Politik Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah sikap dan langkah yang diambil dengan melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain, organisasi internasional serta subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi dan menanggapi isu-isu internasional yang tengah berkembang guna mencapai tujuan nasional. Kebijakan luar negeri merupakan rencana yang dirumuskan oleh pemerintah dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan guna mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri dimaksudkan untuk mengatasi, memperoleh keuntungan dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. (Setiawan dkk, 2018: 46; Razzaq, 2014: 30).

Kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai strategi suatu negara dalam menghadapi negara lain atau aktor internasional lainnya. Kebijakan luar negeri juga merupakan sebuah media yang dikendalikan oleh negara tersebut dalam mencapai tujuan nasional yang secara spesifik dituangkan dalam kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perumusan tujuan suatu negara serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan suatu negara ditentukan oleh rezim yang berkuasa. Dalam rangka memenuhi kepentingan nasional, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai kerjasama yang meliputi kerjasama bilateral, trilateral dan multilateral (Sitorus, 2018: 30-32).

3. Kepemimpinan

a. Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang atau aktivitas kelompok. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Konsep kepemimpinan erat kaitannya dengan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya. Prinsip kepemimpinan berkenaan dengan seseorang yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan, tetapi bukan berarti bahwa setiap orang yang mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan disebut pemimpin. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya (Yudiatmaja, 2013: 30).

Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan juga didefinisikan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan terhadap para anggota kelompok. Definisi ini mengandung tiga implikasi penting, yaitu: kepemimpinan melibatkan orang lain baik itu bawahan atau pengikut, melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya dengan berbagai cara. Dengan demikian, kepemimpinan erat kaitannya dengan pemimpin, pengikut dan situasi tertentu (Syarifudin, 2004: 461).

Kepemimpinan adalah jenis hubungan kekuasaan yang ditentukan oleh anggapan para anggota kelompok bahwa seorang dari anggota kelompok itu memiliki kekuasaan untuk menentukan pola perilaku terkait dengan aktivitasnya sebagai anggota kelompok. Teori kepemimpinan pada dasarnya merupakan kajian tentang individu yang memiliki karakteristik fisik, mental dan kedudukan yang dipandang lebih daripada individu lain dalam suatu kelompok, sehingga

individu yang bersangkutan dapat mempengaruhi individu lain dalam kelompok tersebut untuk bertindak kearah pencapaian suatu tujuan tertentu. Sedangkan gaya kepemimpinan yaitu perilaku atau tindakan seorang pemimpin dapat mempengaruhi dan menggerakkan pengikutnya dalam rangka mencapai suatu tujuan (Wibowo, 2011: 3-4).

b. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan diartikan sebagai pola perilaku dan strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin kepada anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Pudjiyogyanti (1991: 144-145), beberapa gaya kepemimpinan yang disukai atau sering diterapkan oleh pemimpin, antara lain:

1) Gaya Situasional

Kepemimpinan situasional diartikan bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin dapat berubah tergantung tingkat kesiapan para pengikutnya.

2) Gaya Demokrasi

Kepemimpinan demokrasi diartikan bahwa seorang pemimpin akan mengikutsertakan pendapat pengikutnya sebelum membuat keputusan. Keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama melalui musyawarah dan pemikiran kolektif. Gaya kepemimpinan ini mengedepankan musyawarah dan kebebasan mengungkapkan pendapat. Kepemimpinan demokrasi dibangun dengan semangat kebersamaan. Pengikut atau anggota dengan gaya kepemimpinan ini biasanya cenderung bermoral tinggi, dapat bekerjasama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri.

3) Gaya Autoritarian

Kepemimpinan Autoritarian memandang pemimpin sebagai orang yang memberi perintah dan dapat menuntut sehingga keputusan berada ditangan pemimpin. Seorang pemimpin memiliki wewenang mutlak untuk menentukan kebijakan tanpa harus meminta pertimbangan dan bermusyawarah, sedangkan anggota hanya berperan menjalankan program dan kebijakan pemimpin. Pemimpin memiliki wewenang untuk membagi pekerjaan, menurunkan perintah dan memaksa anggota untuk mematuhi secara otoriter. Kepemimpinan Autoritarian ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan

dalam mencapai keputusan dan mengembangkan strukturnya sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi.

4) Gaya Laissezfaire

Peran seorang pemimpin dalam gaya kepemimpinan ini cenderung pasif. Pemimpin memberikan kebebasan mutlak kepada pengikut/anggotanya dalam mengambil keputusan, tindakan atau langkah lain terkait dengan kehidupannya. Pemimpin hanya berperan menyampaikan informasi dan kebijakan serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh anggota untuk menjalankan pekerjaannya.

4. Diplomasi

Diplomasi adalah seni bernegosiasi antara wakil-wakil dari negara atau sekelompok negara untuk mencapai kepentingan nasional negara yang bersangkutan tanpa menimbulkan permusuhan. Diplomasi merupakan cara menjalin hubungan internasional melalui perantara diplomat-diplomat profesional terkait isu perdamaian, perdagangan, perang, ekonomi, sosial dan budaya. Diplomasi digunakan sebagai alternatif hubungan antar negara selain perang. Diplomasi erat kaitannya dengan pelaksanaan politik luar negeri sebagai alat mencapai tujuan politik luar negeri. Negosiasi dalam diplomasi dilakukan melalui cara-cara damai, namun dapat berubah menggunakan ancaman atau kekuatan nyata apabila cara damai menemui kegagalan. Bentuk-bentuk penggunaan alat diplomasi dapat berupa diplomasi kebudayaan, diplomasi publik (*soft power*), kekuatan politik, ekonomi serta maritim. Hal itu disesuaikan pula dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai (Indrawati & Nugroho, 2019: 16).

Terjalinnnya hubungan antarnegara melalui diplomasi tidak hanya merujuk pada terpeliharanya persahabatan dan kesediaan untuk setuju. Kesepakatan atas negosiasi yang dilakukan menandakan negara tersebut telah terikat satu sama lain. Diplomasi dilakukan untuk mencapai kepentingan negara yang menyangkut aspek politik, ekonomi, perdagangan, sosial budaya, militer dan berbagai kepentingan nasional lain dalam bingkai hubungan internasional. Inti diplomasi adalah kesediaan untuk saling memberi dan menerima dalam rangka mencapai saling pengertian diantara negara-negara yang terlibat (Shoelhi, 2011: 79)

5. Olahraga

Olahraga merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Hakikat olahraga yaitu sebagai refleksi kehidupan suatu bangsa. Olahraga dapat menggambarkan nilai-nilai luhur suatu masyarakat yang terpantul dari hasrat mewujudkan diri melalui prestasi olahraga. Kemajuan suatu bangsa dapat tercermin dari prestasi olahraganya, sehingga olahraga menjadi alat pendorong gerakan kemasyarakatan bagi lahirnya insan manusia unggul secara fisik, mental, intelektual, sosial dan mampu membentuk manusia seutuhnya. Olahraga dapat menyatukan individu dan komunis, menyoroti kesamaan dan menjembatani perbedaan budaya atau etnis. Olahraga menyediakan forum untuk belajar ketrampilan seperti disiplin, kepercayaan diri dan kepemimpinan. Olahraga juga mengajarkan prinsip-prinsip sosial seperti toleransi, kerjasama serta rasa hormat. Olahraga merupakan suatu kegiatan yang bersifat fisik, mengandung permainan serta perjuangan dengan diri sendiri maupun orang lain yang terkait dengan interaksi lingkungan atau unsur alam yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesenangan (Mutahir & Ali, 2007: 23).

Olahraga atau *sport* berasal dari bahasa latin *disportate* yang memiliki arti menyenangkan, menghibur dan bergembira ria. Jadi dapat dikatakan bahwa olahraga adalah kegiatan atau kesibukan manusia untuk menggembirakan diri disamping memelihara kesegaran jasmani. Olahraga menjadi wadah manusia untuk mencari kegembiraan dan sebagai cara untuk memperkuat otot-otot, menjaga kondisi fisik, kebugaran jasmani dan kesehatan. Olahraga diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan dan membina kekuatan jasmani maupun rohani. Olahraga adalah budaya manusia sehingga manusia memegang peran penting dalam melakukan aktivitas olahraga. Manusia adalah titik sentral dari olahraga, artinya tidak ada olahraga apabila tidak ada faktor manusia yang secara ragawi berperan melakukan olahraga tersebut. Jadi olahraga merupakan budaya gerak manusia yang dilakukan secara jasmani, rohani maupun kehidupan sosial (Giriwijoyo & Didik, 2013: 37).

Olahraga dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Olahraga dan politik selalu memiliki hubungan yang intim (*an intimate relationship*). Bagi politisi, olahraga merupakan alat yang digunakan untuk menarik massa dalam jumlah yang besar dan menjadi suatu hal yang sulit dijangkau oleh institusi sosial lainnya. Sektor olahraga adalah platform yang sempurna untuk mentransmisikan pesan ke publik. Olahraga juga merupakan “candu bagi massa” yang cocok untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu lain, terutama jika keputusan tidak populer dibuat. Olahraga selalu menjadi target untuk kepentingan politik dari berbagai jenis kelompok dan afiliasi politik. Olahraga juga diyakini memiliki banyak peran dalam membangun sebuah bangsa dan negara. Pemerintahan dibanyak negara, atas nama kepentingan bangsa, telah banyak berinvestasi dalam bidang olahraga, termasuk membangun infrastruktur media komunikasi untuk menyiarkan olahraga. Ada banyak infrastruktur dibangun untuk kepentingan olahraga yang pada akhirnya dapat berfungsi untuk kepentingan publik yang lebih luas (Alatas & Vinnawaty, 2018: 88-89).

Olahraga merupakan salah satu alat untuk melanggengkan atau menghentikan konfrontasi dan konflik. Olahraga merupakan alat diplomasi yang digunakan oleh negara-negara di dunia. Acara olahraga besar yang berskala internasional memiliki kapasitas luar biasa dalam menjadikan suatu pengalaman emosional bersama, yang mana dapat menunjukkan daya tarik serta impresi olahraga sebagai kekuatan politik. Suatu negara dapat menggunakan acara olahraga berskala besar untuk memperlihatkan dan menunjukkan kemajuan bangsanya pada dunia serta mempertegas sikap politiknya di kancah internasional (Sanjaya dkk, 2018: 232; Tiffany & Azmi, 2020: 204).

Olahraga sering diklaim sebagai pengganti perang. Olahraga bahkan telah secara lebih jauh berfungsi sebagai representasi simbolis dari bentuk non-kekerasan, bentuk non-militer dari persaingan antar negara. olahraga dapat menggantikan perang dalam ‘melancarkan agresi’ antar negara dengan cara yang relatif tidak berbahaya. Olahraga juga digunakan oleh para pemimpin politik sebagai bagian dari strategi untuk mempublikasikan atau mengkampanyekan tentang diri mereka ataupun gagasan politik mereka kepada publik. Oleh karena

itu, para politisi maupun pejabat publik menggunakan olahraga sebagai komunikasi politik untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Olahraga telah memainkan peran penting dalam politik, sehingga penggunaan olahraga sebagai alat komunikasi politik merupakan hal yang tidak terindarkan (Alatas & Vinnawaty, 2018: 90).

B. Penelitian yang Relevan

1. Amin Rahayu. (2012). “Pesta Olahraga Asia (Asian Games IV) Tahun 1962 di Jakarta: Motivasi dan Capaiannya”. Universitas Indonesia.

Amin Rahayu membuktikan bahwa Indonesia berhasil terpilih dan ditunjuk oleh *Asian Games Federation* (AGF) untuk menjadi tuan rumah AG IV 1962. Dalam *Asian Games IV* 1962, Indonesia memperoleh sukses ganda, yaitu sukses menjadi tuan rumah dan mendapatkan prestasi menjadi juara umum kedua se-Asia di bawah Jepang sebagai Juara Umum Asia. Prestasi ini menjadi prestasi terbaik Indonesia dalam sejarah penyelenggaraan *Asian Games* yang hingga kini belum bisa diulang kembali. Penelitian ini relevan dengan kajian yang dibahas oleh peneliti mengenai pengaruh Asian Games IV tahun 1962 terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Amin Rahayu memiliki pokok bahasan proses awal hingga akhir penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta. Sedangkan penulis akan lebih terfokus pada gambaran politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin hingga dampak diselenggarakannya Asian Games IV tahun 1962 terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

2. Muhammad Yuanda Zara. (2018). “Tuan Rumah Yang Ramah, Peserta Yang Berprestasi: Imej Indonesia Di Asian Games 1962 di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat”. *Jurnal Patrawidya*, Volume 19, No.2, halaman 173-195.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962 membuktikan Indonesia sebagai kekuatan besar baru di dunia. Penelitian ini lebih menyoroti mengenai ruang publik lokal, khususnya surat kabar Kedaulatan Rakyat di

Yogyakarta yang selama sekitar sebulan (1 Agustus-5 September 1962) menggambarkan perhelatan Asian Games 1962, mulai dari persiapan hingga suksesnya pelaksanaan Asian Games 1962 di Jakarta. Penelitian ini juga memaparkan kritikan mengenai kekurangan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games 1962. Penelitian ini relevan dengan pokok kajian yang dibahas oleh peneliti, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan dan penyusunan sumber data yang berasal dari surat kabar Kedaulatan Rakyat. Walaupun demikian, terdapat perbedaan yaitu fokus bahasan yang berbeda. Penelitian penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah pada dampak dalam bidang politik yang ditimbulkan setelah keberhasilan Indonesia menggelar Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta.

3. Arifin Suryo Nugroho. (2016). “Soekarno dan Diplomasi Indonesia”. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Penelitian ini membuktikan bahwa Indonesia tampil sebagai kekuatan baru di dunia untuk menandingi kekuatan barat yang menjadi ancaman terhadap eksistensi Indonesia. Presiden Soekarno membentuk *The New Emerging Force* (NEFOS) sebagai representasi negara-negara dunia ketiga sebagai kekuatan baru untuk melawan kedigdayaan *The Old Established Force* (OLDEFOS) yang berisikan negara-negara maju. Peneliti menggunakan penelitian ini untuk mengetahui langkah-langkah diplomasi yang diterapkan oleh presiden Soekarno dalam rangka membangun hubungan luar negeri. Pokok bahasan dalam penelitian ini relevan dengan materi yang dikaji oleh peneliti. Akan tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu penulis lebih terfokus pada langkah diplomasi yang dilakukan oleh Soekarno dalam membangun hubungan politik luar negeri melalui penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta.

4. Gili Argenti dan Dini Sri Istiningdias. (2017). “Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin”. *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 2, No.2, halaman 14-27.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Soekarno mengenai demokrasi terpimpin telah menempatkan sosoknya sebagai pemimpin yang otoriter dan berbanding terbalik dengan kepribadiannya yang dikenal sebagai sosok pemikir politik yang revolusioner, humanis dan progresif. Penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk memahami pemikiran Soekarno mengenai demokrasi terpimpin, sehingga akan diketahui ciri kepemimpinan Soekarno yang berdampak pada setiap pengambilan keputusan berkaitan dengan permasalahan yang tengah dihadapi negara. Dengan demikian, peneliti akan lebih mengenal sosok Soekarno dan mengetahui alasan Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin ketika memerintah Indonesia. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena pada dasarnya peneliti lebih terfokus pada bidang politik luar negeri terutama setelah keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pesta olahraga Asian Games IV tahun 1962. Dengan demikian, penelitian ini digunakan sebagai acuan memahami pemikiran Soekarno mengenai demokrasi terpimpin yang dicetuskannya.

5. Anwar Ilmar. (2018). "Demokrasi Terpimpin dalam Pemikiran dan Praktik Politik". *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, Vol.4, No.1, Maret-Agustus.

Anwar Ilmar memberikan hasil bahwa Soekarno merumuskan gagasan mengenai demokrasi terpimpin yang dianggap mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Melalui demokrasi terpimpin, Soekarno berupaya melakukan pemerintahan terpusat yang sesuai dengan kondisi Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Namun kenyataannya, konsep tersebut jauh dari gambaran ideal pemikiran politik Soekarno. Penelitian ini relevan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh penulis untuk mengetahui ciri kepemimpinan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Sehingga penelitian ini dapat mempermudah peneliti mendalami kondisi Indonesia masa kepemimpinan Soekarno.

6. Fan Hong. (2006). "Sport, Social Transformation and Political Independence: The Asian Games.

Fan Hong membuktikan bahwa penyelenggaraan Asian Games berpengaruh terhadap hubungan regional dan bilateral antar negara, hubungan politik regional dan global serta organisasi olahraga terkhusus di Asia. Penelitian ini relevan dengan materi yang akan dikaji oleh peneliti, dimana bidang olahraga dapat mempermudah dan memperlancar terlaksananya hubungan politik luar negeri Indonesia. Melalui penelitian ini akan memperjelas bahwa bidang olahraga juga dapat dijadikan alat untuk memperkuat posisi negara Indonesia di dunia internasional. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu fokus permasalahan yang sedikit berbeda karena penelitian ini membahas secara garis besar beberapa kegiatan olahraga yang digunakan untuk menjalin hubungan kerjasama, sedangkan peneliti melakukan penelitian yang lebih khusus berkenaan dengan pelaksanaan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta yang berdampak pada kelancaran hubungan politik luar negeri Indonesia.

7. Iain Adams. (2003). "Pancasila: Sport and the Building of Indonesia – Ambitions and Obstacles". *The International Journal of the History of Sport: Frank Class Publ.* Vol.9, No.2.

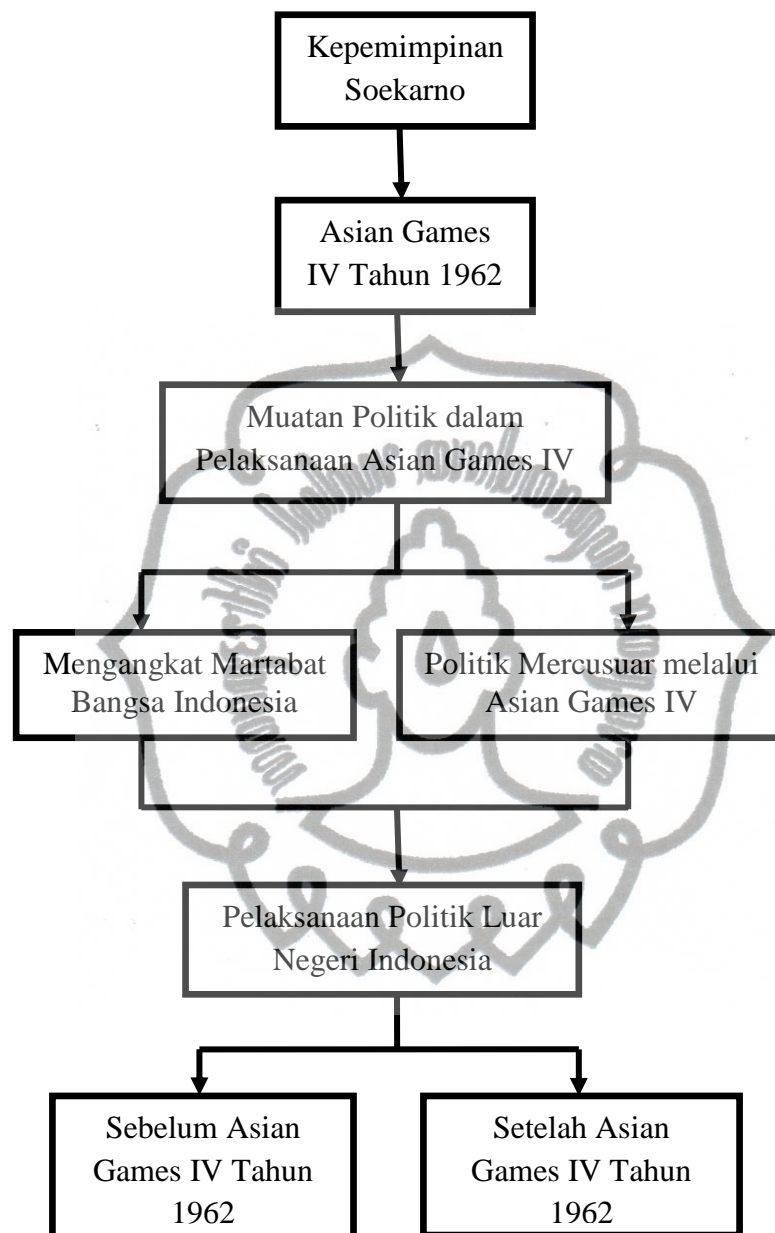
Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa bidang olahraga menjadi salah satu sarana mengembangkan rasa nasionalisme serta memperkuat legitimasi Indonesia di kancah internasional. Indonesia berusaha ikut serta dalam berbagai pesta olahraga di dunia guna memperlihatkan eksistensinya dalam bidang olahraga. Keberhasilan Indonesia ketika menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta menjadi kebanggaan dan berdampak pada posisi Indonesia di dunia. Perhelatan tersebut berdampak pula pada pembangunan fasilitas pendukung terlaksananya Asian Games IV yang berpengaruh pula dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga pada tahun-tahun selanjutnya. Penelitian ini relevan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh peneliti, karena dalam penelitian ini telah sedikit menjelaskan mengenai dampak dari keberhasilan Indonesia dalam

menyelenggarakan acara olahraga. Namun, cakupan bahasan dalam penelitian ini luas sehingga tidak hanya terkhusus menyoroti salah satu perhelatan olahraga. Sedangkan peneliti melakukan penelitian yang lebih khusus pada perhelatan olahraga Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta yang menjadi lahan bagi Indonesia untuk memperlihatkan wajahnya kepada dunia internasional.

Beberapa penelitian diatas menjadi acuan bagi peneliti dalam rangka mendalami materi yang akan dikaji. Di samping itu, penelitian yang relevan dapat mempermudah peneliti dalam menyeleksi dan menyusun sumber data yang sesuai dengan materi kajian. Berbeda dengan beberapa penelitian diatas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih khusus mengkaji mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

C. Kerangka Berpikir

Kepemimpinan Presiden Soekarno terlihat melalui strategi dan langkahnya dalam membuat kebijakan dan menentukan sikap menghadapi situasi dunia. Asian Games IV tahun 1962 merupakan salah satu strategi diplomasi Soekarno untuk memperlihatkan kemampuan dan kekuatan Indonesia sebagai negara baru merdeka. Presiden Soekarno berusaha menjadikan negara Indonesia sebagai pusat dari negara-negara yang sedang berkembang melalui politik mercusuar. Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV mempengaruhi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, dimana posisi Indonesia menjadi lebih diperhitungkan dan tidak lagi diremehkan. Disamping itu, Indonesia semakin berani mengambil langkah tampil dalam percaturan politik dunia.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir